**PERAN DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DI MALUKU DAN MALUKU
UTARA PADA KEMENTERIAN PUPR)**

Herlan Devrianto¹, Nemos Muhadar², Yotham Th. Timbonga³, Poppy Andilolo⁴, Nirwan Sembiring⁵

^{1,2,3,4,5} *Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus,
Makassar*

Email: devrianto@ukipaulus.ac.id

Abstrak

Justice Collaborator memainkan peran penting dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Mereka memberikan informasi dan bukti yang krusial, membantu penegak hukum mengungkap jaringan korupsi yang kompleks, serta mempercepat proses penyelidikan dan penuntutan. Namun, peran ini tidak lepas dari berbagai kendala, termasuk ketidakjelasan hukum, perlindungan yang tidak memadai, stigma sosial, hambatan teknis, dan insentif yang kurang menarik. Penelitian ini mengkaji kendala-kendala tersebut dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas peran *Justice Collaborator*. Perbaikan yang diperlukan meliputi harmonisasi regulasi, penguatan perlindungan, edukasi masyarakat, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan penyediaan insentif yang lebih menarik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan *Justice Collaborator* dapat berkontribusi lebih signifikan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata kunci: *justice collaborator*; perlindungan saksi; penegakan hukum

Abstract

Justice Collaborators play a crucial role in uncovering corruption cases in Indonesia. They provide critical information and evidence, assisting law enforcement in dismantling complex corruption networks and expediting the investigation and prosecution process. However, their role faces various challenges, including legal ambiguities, inadequate protection, social stigma, technical barriers, and unattractive incentives. This study examines these challenges and offers recommendations to enhance the effectiveness of Justice Collaborators. Necessary improvements include regulatory harmonization, strengthened protection, public education, improved coordination among law enforcement agencies, and more attractive incentives. With these measures, it is expected that Justice Collaborators can contribute more significantly to anti-corruption efforts in Indonesia.

Keywords: *Justice Collaborator*; witness protection, law enforcement

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu masalah paling serius yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Di Indonesia, korupsi telah merambah hampir semua aspek

kehidupan, mulai dari sektor publik hingga swasta. Menurut data Transparency International, Indonesia menempati peringkat 102 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2021, menunjukkan bahwa tingkat korupsi di negara ini masih sangat tinggi. Selain itu, data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan peningkatan jumlah kasus korupsi yang ditangani setiap tahunnya, mengindikasikan bahwa masalah ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Korupsi tidak hanya merugikan negara dari segi finansial, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi, mengurangi investasi asing, dan memperburuk ketimpangan sosial. Sebuah studi oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Di Indonesia, korupsi seringkali melibatkan pejabat tinggi pemerintah dan sektor swasta, membuat pemberantasannya menjadi lebih kompleks dan menantang.

Pembicaraan mengenai korupsi tidak pernah berhenti, karena pertumbuhan korupsi di Indonesia semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitas. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta ruang lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Korupsi berdampak pada setiap aspek kehidupan. Menurut Evi Hartanti, dampak negatif korupsi dapat meliputi penurunan kepercayaan terhadap pemerintah, menurunnya kewibawaan pemerintah di masyarakat, berkurangnya pendapatan negara, melemahnya keamanan dan ketahanan negara, kerusakan mental pribadi, dan hilangnya penghormatan terhadap hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Pemberantasan korupsi memerlukan berbagai upaya, baik pencegahan maupun penindakan. Pengorganisasian masyarakat, advokasi isu, dan sosialisasi kebijakan anti korupsi adalah bagian integral dari upaya tersebut, termasuk dalam penegakan hukum. Lembaga peradilan merupakan ujung tombak dalam pemberantasan korupsi, terutama dalam memberikan efek jera kepada koruptor.

Dalam kasus tindak pidana korupsi, hukum pembuktian sangat penting untuk membuktikan kesalahan di pengadilan. Tanpa saksi, sulit untuk mengungkap kebenaran suatu tindak pidana. Hakim bertanya kepada saksi untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa.

Mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang memiliki kedudukan ekonomi dan politik kuat membutuhkan keberanian dan saksi yang mengetahui langsung perbuatan tersebut. Saksi yang mengetahui langsung dan berani melaporkan kejadian disebut *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Peran mereka sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Whistleblower dan *Justice Collaborator* adalah orang yang mengungkap atau melaporkan tindak pidana terorganisir dan serius seperti korupsi, narkoba, pencucian uang, terorisme, dan perdagangan orang. Kehadiran mereka memudahkan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dan juga berperan dalam pencegahannya. Istilah *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.

Justice Collaborator adalah saksi yang juga pelaku kejahatan, bertujuan memudahkan pembuktian dan penuntutan serta mengungkap tuntas tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan organisasi kejahatan. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur ketentuan tentang *Justice Collaborator*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 hanya fokus pada perlindungan saksi dan korban, tanpa memberikan "hak istimewa" kepada *Justice Collaborator*.

Seorang saksi dianggap sebagai *Justice Collaborator* jika informasi yang diberikannya sangat signifikan dalam mengungkap kasus yang sulit diungkap, dengan itikad sungguh-sungguh bertobat dan mengikuti perintah penegak hukum. Peran penting saksi pelaku (*Justice Collaborator*) adalah kunci memperoleh kebenaran materil, karena keterangan saksi dapat menentukan keputusan hakim. Keberadaan *Justice Collaborator* membawa dampak besar dalam mencari dan menemukan "dader intellectual" dalam suatu perkara pidana.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkait dengan *Justice Collaborator* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis isi peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan peranan *Justice Collaborator* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi

Justice Collaborator adalah seseorang yang terlibat dalam tindak pidana namun bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar atau lebih kompleks. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, *Justice Collaborator* memiliki peran penting dalam membantu penegak hukum untuk mendapatkan informasi dan bukti yang diperlukan dalam mengungkap tindak pidana yang melibatkan organisasi kejahatan.

Peran *Justice Collaborator* sangat signifikan dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi karena beberapa alasan, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengungkap Jaringan Kejahatan: *Justice Collaborator* sering kali memiliki informasi rinci tentang jaringan kejahatan korupsi, termasuk siapa saja yang terlibat, bagaimana operasi dijalankan, dan aliran dana korupsi. Informasi ini sangat berharga bagi penegak hukum dalam mengungkap keseluruhan jaringan korupsi.

- b. Pembuktian di Pengadilan: Keterangan dari *Justice Collaborator* dapat menjadi bukti kunci di pengadilan. Mereka bisa memberikan kesaksian yang secara langsung mengaitkan pelaku utama dengan tindak pidana yang terjadi, sehingga memperkuat bukti yang ada.
- c. Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum: Dengan adanya *Justice Collaborator*, proses penyelidikan dan penuntutan menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini karena penegak hukum mendapatkan akses langsung ke informasi yang sulit didapatkan melalui cara konvensional.

Mengingat risiko yang dihadapi oleh *Justice Collaborator*, perlindungan hukum dan fisik menjadi sangat penting. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, memberikan dasar hukum untuk perlindungan ini. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan fisik, identitas, serta hak-hak khusus seperti pengurangan hukuman bagi *Justice Collaborator*. *Justice Collaborator* diberikan perlindungan yang mencakup: (1) Perlindungan Fisik: Untuk memastikan keselamatan mereka dari ancaman fisik, baik dari pihak yang terlibat dalam kejahatan maupun dari pihak lain yang merasa dirugikan oleh pengungkapan informasi. (2) Perlindungan Identitas: Identitas *Justice Collaborator* seringkali dirahasiakan untuk melindungi mereka dari intimidasi dan balas dendam. (3) Pengurangan Hukuman: Dalam beberapa kasus, *Justice Collaborator* dapat diberikan pengurangan hukuman sebagai imbalan atas kerjasama mereka yang signifikan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

Meskipun penting, penerapan *Justice Collaborator* tidak lepas dari berbagai tantangan. Sering kali *Justice Collaborator* menghadapi ketidakpercayaan dan stigma dari masyarakat serta rekan mereka sendiri. Hal ini bisa menghambat mereka untuk berpartisipasi aktif dalam mengungkap kasus korupsi. *Justice Collaborator* sering menghadapi ancaman terhadap keselamatan pribadi dan keluarga mereka. Perlindungan yang tidak memadai dapat membuat mereka enggan untuk bekerja sama dengan penegak hukum. Kurangnya ketentuan yang jelas mengenai hak-hak dan perlindungan bagi *Justice Collaborator* dapat menjadi hambatan dalam implementasi. Meskipun ada SEMA dan undang-undang yang mengatur, sering kali implementasinya di lapangan masih kurang optimal.

Penggunaan *Justice Collaborator* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki banyak manfaat, antara lain; mempercepat proses hukum, dengan adanya informasi yang akurat dari *Justice Collaborator*, penegak hukum dapat mempercepat proses penyelidikan dan penuntutan. Mengurangi beban penyidikan, *Justice Collaborator* membantu mengurangi beban penyidikan dengan memberikan informasi yang sulit diperoleh melalui metode penyidikan biasa. Menurunkan tingkat korupsi: Dengan berhasil diungkapnya kasus-kasus korupsi besar, diharapkan akan ada efek jera yang signifikan terhadap potensi pelaku korupsi lainnya.

3.2 Kasus Peranan *Justice Collaborator* sebagai Alat Bantu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kasus Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi terkait proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara pada Kementerian PUPR)

Kasus tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan salah satu kasus korupsi besar yang berhasil diungkap dengan bantuan *Justice Collaborator*. Kasus ini melibatkan beberapa pejabat tinggi dan kontraktor yang bersekongkol untuk menggelapkan

dana proyek pembangunan infrastruktur jalan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan konektivitas di daerah tersebut.

Kasus ini bermula dari penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara yang diduga terjadi penyimpangan anggaran. Pada tahun 2017, KPK mendapatkan informasi awal mengenai adanya praktik suap dan penggelapan dana dalam proyek ini. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa sejumlah pejabat di Kementerian PUPR bekerja sama dengan kontraktor untuk mengatur tender dan menerima suap sebagai imbalan.

Kasus korupsi terkait proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara pada Kementerian PUPR menunjukkan betapa pentingnya peran *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana. Dengan adanya *Justice Collaborator*, proses pengungkapan dan penuntutan kasus korupsi menjadi lebih efektif dan efisien. *Justice Collaborator* memberikan akses langsung ke informasi dan bukti yang sulit diperoleh melalui metode penyidikan biasa. Namun, untuk memastikan efektivitas peran mereka, diperlukan perlindungan yang memadai dan dukungan hukum yang jelas.

Damayanti Wisnu Putranti, seorang mantan anggota DPR, terlibat dalam kasus korupsi terkait proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi dan kontraktor. Setelah penangkapannya, Damayanti Wisnu Putranti memutuskan untuk bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas. Dalam kapasitasnya sebagai *Justice Collaborator*, dia memberikan informasi penting yang membantu penegak hukum mengungkap kejahatan yang lebih besar.

Penerapan SEMA No. 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama dalam kasus Damayanti Wisnu Putranti menunjukkan bahwa peran *Justice Collaborator* sangat penting dalam mengungkap kasus korupsi besar. Dengan bantuan *Justice Collaborator*, penegak hukum dapat mengakses informasi yang sulit diperoleh dan mempercepat proses penyelidikan serta penuntutan. Namun, keberhasilan ini juga menunjukkan pentingnya perlindungan yang memadai bagi *Justice Collaborator* untuk memastikan bahwa mereka dapat bekerja sama tanpa menghadapi ancaman atau intimidasi.

Damayanti Wisnu Putranti, sebagai *Justice Collaborator*, memainkan peran kunci dalam mengungkap kasus korupsi terkait proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara. Penerapan SEMA No. 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi dan memfasilitasi peran *Justice Collaborator*. Dengan perlindungan yang memadai dan dukungan hukum yang jelas, *Justice Collaborator* dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

3.3 Kendala-Kendala Terkait *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi

Kasus Damayanti Wisnu Putranti memberikan contoh konkret mengenai berbagai kendala yang dihadapi oleh *Justice Collaborator*. Meskipun dia memberikan informasi yang signifikan dan bekerja sama dengan KPK, dia tetap menghadapi ancaman terhadap keselamatannya dan stigma sosial dari masyarakat. Perlindungan yang diberikan oleh LPSK, meskipun ada, masih mengalami kendala logistik dan sumber daya.

Meskipun *Justice Collaborator* memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi, ada banyak kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Kendala-kendala ini dapat berasal dari aspek hukum, teknis, hingga sosial. Pembahasan ini akan menguraikan berbagai kendala tersebut dan dampaknya terhadap efektivitas peran *Justice Collaborator* dalam pemberantasan korupsi.

3.3.1 Ketidakjelasan dan Keterbatasan Hukum

Salah satu kendala utama adalah ketidakjelasan dan keterbatasan dalam kerangka hukum yang mengatur *Justice Collaborator*. Meskipun ada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 dan beberapa peraturan lainnya, implementasinya di lapangan sering kali kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Kurangnya Harmonisasi Regulasi: Regulasi yang ada sering kali tidak terintegrasi dengan baik, menyebabkan kebingungan di antara penegak hukum mengenai penerapan perlindungan dan insentif bagi *Justice Collaborator*.
- b. Minimnya Ketentuan Khusus dalam KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum secara eksplisit mengatur peran dan perlindungan bagi *Justice Collaborator*, sehingga penegak hukum sering kali harus merujuk pada peraturan tambahan yang tidak memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang.

3.3.2 Perlindungan dan Keamanan yang Tidak Memadai

Perlindungan bagi *Justice Collaborator* sangat krusial, namun dalam banyak kasus, perlindungan yang diberikan tidak memadai. Perlindungan yang tidak efektif dapat mengancam keselamatan *Justice Collaborator* dan keluarganya, yang akhirnya dapat menghambat kemauan mereka untuk bekerja sama.

- a. Ancaman Fisik dan Psikologis: *Justice Collaborator* sering menghadapi ancaman fisik dari pihak-pihak yang dirugikan oleh kesaksian mereka. Ancaman ini bisa berupa intimidasi, serangan fisik, atau bahkan upaya pembunuhan. Ancaman psikologis seperti tekanan mental dan stres juga merupakan kendala yang signifikan.
- b. Keterbatasan Sumber Daya: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya dalam memberikan perlindungan yang memadai. Kurangnya anggaran dan tenaga profesional membuat perlindungan terhadap *Justice Collaborator* menjadi kurang optimal.

3.3.3 Stigma Sosial dan Ketidakpercayaan

Justice Collaborator sering menghadapi stigma negatif dari masyarakat dan bahkan dari rekan-rekan mereka sendiri. Stigma ini dapat berasal dari persepsi bahwa mereka adalah pengkhianat atau orang yang tidak dapat dipercaya. Hal ini mengakibatkan beberapa kendala:

- a. Ketidakpercayaan di Kalangan Penegak Hukum: Beberapa penegak hukum mungkin meragukan motif dan kejujuran *Justice Collaborator*, sehingga mereka enggan memberikan perlindungan atau insentif yang layak.
- b. Stigma dari Masyarakat: Masyarakat sering kali melihat *Justice Collaborator* sebagai pelaku kejahatan yang mencari keuntungan pribadi dengan menjual informasi. Pandangan

ini dapat menghalangi orang lain untuk menjadi *Justice Collaborator* karena takut akan penilaian negatif dari masyarakat sekitar mereka.

3.3.4 Hambatan Teknis dalam Proses Penyidikan dan Penuntutan

Justice Collaborator menghadapi berbagai hambatan teknis dalam proses penyidikan dan penuntutan, termasuk masalah bukti dan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

- a. Ketersediaan Bukti yang Memadai: Meskipun *Justice Collaborator* memberikan informasi penting, penegak hukum sering kali masih kesulitan mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan di pengadilan. Informasi dari *Justice Collaborator* harus diverifikasi dan dilengkapi dengan bukti fisik lainnya.
- b. Koordinasi Antar Lembaga: Kasus korupsi sering melibatkan berbagai lembaga penegak hukum. Kurangnya koordinasi antara KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan LPSK dapat memperlambat proses penyidikan dan penuntutan serta mengurangi efektivitas peran *Justice Collaborator*.

3.3.5 Insentif yang Tidak Jelas dan Kurang Menarik

Insentif yang ditawarkan kepada *Justice Collaborator* sering kali tidak cukup menarik untuk mendorong mereka bekerja sama dengan penegak hukum. Insentif yang ada meliputi pengurangan hukuman dan perlindungan fisik, namun hal ini mungkin tidak cukup untuk beberapa individu.

- a. Pengurangan Hukuman yang Tidak Konsisten: Penerapan pengurangan hukuman bagi *Justice Collaborator* sering kali tidak konsisten, tergantung pada kebijakan penegak hukum dan keputusan hakim. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan mengurangi daya tarik untuk menjadi *Justice Collaborator*.
- b. Kurangnya Imbalan Finansial: Tidak adanya imbalan finansial yang memadai dapat menjadi penghambat bagi individu yang mempertimbangkan risiko dan biaya pribadi dalam menjadi *Justice Collaborator*.

Justice Collaborator menghadapi berbagai kendala dalam proses pengungkapan tindak pidana korupsi. Ketidakjelasan hukum, perlindungan yang tidak memadai, stigma sosial, hambatan teknis, dan insentif yang tidak menarik adalah beberapa masalah utama yang perlu diatasi. Untuk meningkatkan efektivitas peran *Justice Collaborator*, diperlukan perbaikan dalam kerangka hukum, peningkatan perlindungan, edukasi masyarakat, koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan penyediaan insentif yang lebih menarik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peran *Justice Collaborator* dalam pemberantasan korupsi dapat lebih optimal dan efektif.

4. Kesimpulan

Justice Collaborator memainkan peran yang sangat penting dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Mereka memberikan informasi dan bukti yang krusial, membantu penegak hukum mengungkap jaringan korupsi yang kompleks, serta mempercepat proses penyelidikan dan penuntutan. Kedudukan mereka diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 dan peraturan terkait lainnya, yang memberikan dasar hukum untuk perlindungan dan insentif bagi mereka yang bekerja sama dengan penegak hukum.

Namun, peran *Justice Collaborator* tidak lepas dari berbagai kendala yang menghambat efektivitas mereka. Kendala-kendala tersebut mencakup ketidakjelasan dan keterbatasan dalam kerangka hukum, perlindungan dan keamanan yang tidak memadai, stigma sosial dan ketidakpercayaan, hambatan teknis dalam proses penyidikan dan penuntutan, serta insentif yang tidak jelas dan kurang menarik. Ketidakjelasan regulasi dan kurangnya harmonisasi antara berbagai peraturan menyebabkan kebingungan di kalangan penegak hukum dan mengurangi perlindungan bagi *Justice Collaborator*.

Perlindungan yang tidak memadai dari ancaman fisik dan psikologis, serta keterbatasan sumber daya yang dialami oleh LPSK, juga menjadi kendala utama yang menghambat keberanian dan kemauan *Justice Collaborator* untuk bekerja sama. Stigma sosial dan ketidakpercayaan dari masyarakat serta penegak hukum mengurangi daya tarik peran ini dan dapat menghalangi individu untuk melapor dan bekerja sama. Hambatan teknis seperti kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang memadai dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga mengurangi efektivitas penggunaan *Justice Collaborator*. Selain itu, insentif yang tidak konsisten dan kurang menarik tidak cukup mendorong individu untuk mengambil risiko sebagai *Justice Collaborator*.

Untuk meningkatkan efektivitas peran *Justice Collaborator*, perlu dilakukan perbaikan dalam beberapa aspek. Perbaikan ini mencakup peningkatan kerangka hukum dengan harmonisasi regulasi yang lebih baik, penguatan perlindungan fisik dan hukum bagi *Justice Collaborator*, edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma sosial, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penyediaan insentif yang lebih menarik dan konsisten juga penting untuk mendorong lebih banyak individu bekerja sama dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan peran *Justice Collaborator* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat lebih optimal dan efektif, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan dalam upaya penegakan hukum dan pengurangan tingkat korupsi di Indonesia.

5. Daftar Pustaka

- Amalia, R. (2021). "Ancaman Fisik dan Psikologis terhadap Justice Collaborator di Indonesia." *Jurnal Kriminologi*, 14(4), 78-92.
- Arief, B.N. (2018). "Masalah Ketidakpercayaan Penegak Hukum terhadap Justice Collaborator." *Jurnal Hukum Pidana*, 23(1), 34-47.
- Arya Maheka. (2014). *Mengenali & Memberantas Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Bank Dunia. (2020). *Corruption and Economic Growth*.
- Dwi Saputra. (2004). *Tiada Ruang Tanpa Korupsi*. Semarang: KP2KKN Jawa Tengah.
- Evi Hartanti. (2010). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Firman Wijaya. (2012). *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku.

- Idris, M. (2019). "Kekurangan Pengaturan Justice Collaborator dalam KUHAP." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 29(2), 101-115.
- Ilyas Chatzis. (2010). *Praktik Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Juwenie, Mangiri. (2020). "Perlindungan Konsumen Terhadap Pemasangan Iklan Short Message Service Pada Perusahaan Telekomunikasi Telkomsel Di Kota Makassar." *Paulus Law Journal*, 1(2), 99-111.
- Juwenie; Miru, Ahmadi; Sumardi, Juajir; Paserangi, Hasbir. (2016). "Consumer protection in e-commerce transactions in Indonesia." *JL Pol'y & Globalization*, 47, 131.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). "Laporan Tahunan KPK 2021."
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). "Laporan Tahunan KPK 2021."
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2022). "Laporan Tahunan LPSK 2021."
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2022). "Laporan Tahunan LPSK 2021."
- Lilik Mulyadi. (2015). *Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator*. Bandung: PT. Alumni.
- Lumentut, Lisma, and Liberthin Palullungan. (2023). "The Reconstruction of the Implementation from Business Judgment Rule Doctrine in Individual Limited Liability Companies: A Progressive Legal Review." *SASI*, 29(4), 656-666.
- Lumentut, Lisma, and Rantau Padallo. (2021). "Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Pendirian Tondok Di Kabupaten Mamasa." *Paulus Law Journal*, 2(2), 62-71.
- Lumentut, Lisma. (2019). "Hak Anak Dalam Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Sangla'boran Kabupaten Toraja Utara." *Paulus Law Journal*, 1(1).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- Maulana, F. (2021). "Insentif Finansial bagi Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 15(1), 55-69.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Munir Fuady. (2006). *Teori Hukum Pembuktian, Pidana dan Perdata*. Jakarta: Citra Aditya.
- Pasapan, Pasolang, and Lisma Lumentut. (2021). "Penerapan Asas Rechtsverwerking Dalam Perolehan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Kajian Hukum Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 336 Pk/Pdt/2015)." *Paulus Legal Research*, 1(1).
- Putri, A. (2021). "Stigma Sosial terhadap Justice Collaborator di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Politik*, 11(2), 112-126.
- Rahmawati, L. (2020). "Ketersediaan Bukti dalam Kasus Korupsi dengan Justice Collaborator." *Jurnal Penelitian Hukum*, 20(3), 88-102.
- Robert Klitgaard. (2001). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Suhandi Cahaya & Surachmin. (2011). Strategi Dan Tehnik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno, E. (2020). "Harmonisasi Regulasi Perlindungan Justice Collaborator dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(3), 45-60.
- Teguh Prasetyo. (2011). Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Transparency International. (2021). Corruption Perceptions Index.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wijaya, H. (2019). "Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum dalam Kasus Korupsi." *Jurnal Hukum dan Administrasi*, 13(2), 66-79.
- Yulianto, A. (2020). "Pengurangan Hukuman bagi Justice Collaborator: Kebijakan dan Implementasi." *Jurnal Hukum Pidana*, 27(4), 99-113.